



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

RENCANA KERJA TAHUN 2025

BADAN KEUANGAN DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 dapat selesai sesuai dengan yang diharapkan. Dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Renja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakkan **stakeholders** terhadap Kota Pangkalpinang.

Selain itu Renja Tahun 2025 di susun dengan mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Atas tersusunnya Renja ini kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas partisipasi dan kepeduliannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, amin.

Pangkalpinang, April 2024



MUHAMMAD YASIN, S.E, M.M

PEMBINA TK.I / IV B

NIP. 197311222002121006

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja ini merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan ke dalam KUA Perubahan dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025.
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, antara lain:

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Berpedoman kepada Perubahan RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar di bawah:

Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2025, dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang, sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja OPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2025.

1.3. Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 23

Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 471);

17. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, seri E Nomor 03);
18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2025 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 08 Seri E);
19. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, seri D Nomor 01);
20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18).
21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51).

1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Perencanaan kinerja (Renja) tahun 2025 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang disusun dengan sistematika, sebagai berikut

BAB I. PENDAHULUAN berisi :

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan Renja

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023 berisi :

- 2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD
- 2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD
- 2.3. Isu-isu Rencana Penyelenggaraan Tupoksi OPD

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

berisi:

- 1.1. Tujuan dan Sasaran OPD
- 1.2. Program dan Kegiatan OPD

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH TAHUN 2025

BAB. V. PENUTUP

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2023
BADAN KEUANGAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG

2.1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Pada tahun 2023 Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang melaksanakan 4 (empat) Program dan 16 (enam belas) kegiatan dan 60 sub kegiatan dengan besaran anggaran sebesar Rp 51.063.627.191 dengan realisasi anggaran sebesar 44.772.591.475, terdiri dari :

1. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 kegiatan, 20 sub kegiatan
2. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 kegiatan, 6 sub kegiatan
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 kegiatan , 11 sub kegiatan
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 9 kegiatan, 33 sub kegiatan

No.	Program 2023 (APBD-P)	Anggaran Perubahan 2023 (Rp)	REALISASI ANGGARAN 2023 (Rp)	%
1.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	5.050.509.372	2.881.594.857	57,06
2.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	2.202.298.344	1.636.471.421	74,31
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	6.764.795.804	5.884.200.460	86,98
4.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	37.046.023.671	34.370.324.737	92,78
JUMLAH		51.063.627.191	44.772.591.475	87,68

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana dan pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 sampai dengan Triwulan IV adalah sebagaimana tersebut dalam tabel di bawah ini :

TRIWULAN IV
Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Badan Keuangan Daerah
Kota Pangkalpinang Tahun 2023

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Target Kinerja dan Anggaran Rencana Pemerintah Daerah Tahun berjalan 2022		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2022		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100	37.285.058.616	100	33.590.534.333	100	90.091	Sekretariat
		Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretariat
		Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretariat
		Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kefititas pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretariat
		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	2		100		100		Sekretariat
		Persentase OPD yang melaksanakan manajemen Ase/BMD (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretariat
		Meningkatnya rasio belanja terhadap anggaran belanja (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Sekretariat
2	Pencapaian, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersumunya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja (Dengan Satuan:%)	100	25.250.000	100	16.228.000	100	64.320	Sekretaris
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	12.315.000			100	60.723	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
4	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)	1	8.410.000			100	63.258	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen SIP, LAKIP, dan Reformasi Birokrasi (Dengan Satuan:Dokumen)	3	4.505.000			100	76.138	Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
6	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	28.426.698.966			100	91.856	Sekretaris
7	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan (Dengan Satuan:Orang)	71	28.271.314.816			100	91.927	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
8	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah laporan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Dengan Satuan:Laporan)	12	81.796.000			100	98.477	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	6.300.000	1	3.465.000	100	55.000	Sub Bagian Keuangan
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Bulanan/Trivulan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/trivulan/semesteran SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	1	6.300.000	1	5.712.000	100	90.667	Sub Bagian Keuangan
11	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran (Dengan Satuan:Laporan)	1	60.988.150	1	33.089.900	100	54.256	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
12	Administrasi Barang Milik Daerah/pada Perangkat Daerah	Terperluhunya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	100	80.290.200	100	77.980.000	100	97.123	Sekretaris
13	Pertanggungjawaban Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan pertanggungjawaban BMD pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	12	80.290.200	12	77.980.000	100	97.123	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
14	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Terperluhunya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	14.000.000	100	0	100	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
15	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Persentase terfaksasinya pelaporan pengolahan retribusi daerah (Dengan Satuan:%)	100	14.000.000	100	0	100	0	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
16	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terperluhunya Administrasi Kepegawaian (Dengan Satuan:%)	100	363.397.400	100	300.195.000	100	82.608	Sekretaris
17	Pengadaan Paksiat Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paksiat Dinas beserta Atribut (Dengan Satuan:Set)	180	284.149.000	180	263.595.000	100	92.766	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
18	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan administrasi kepegawaian (Dengan Satuan:Laporan)	12	29.248.400	12	27.100.000	100	92.655	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
19	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi (Dengan Satuan:Orang)	10	50.000.000	10	9.500.000	100	19	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
20	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terperluhunya Administrasi Umum (Dengan Satuan:%)	100	2.642.169.250	100	2.273.273.326	100	86.038	Sekretaris
21	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:unit/set)	10	48.749.000	10	44.045.000	100	90.351	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
22	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan (Dengan Satuan:unit/set)	3	717.915.000	3	626.327.000	100	87.270	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
23	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan (Dengan Satuan:unit/set)	6	9.384.150	6	8.765.000	100	93.402	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
24	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah makanan dan minuman yang di sediakan (Dengan Satuan:Porti)	1.340	533.822.500	1.340	476.931.500	100	89.343	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

25	Persediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan (Dengan Satuan unit/set)	13	74.450.000	13	43.960.850	100	59.047	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
26	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan (Dengan Satuan: Kali)	45	926.180.200		871.035.043	100	94.046	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
27	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dinamis yang di t a t a (D e n g a n Satuan: Berkas)	30	331.668.400		202.608.933	100	60.907	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
28	Pengadaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperbihnya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: %)	100	3.225.598.000		2.964.589.000	100	91.526	Sekretaris
29	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1	2.136.407.000		1.984.106.000	100	92.871	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
30	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1	601.640.000		541.377.000	100	89.984	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
31	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan (Dengan Satuan: Unit)	1	487.351.000		439.506.000	100	90.183	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
32	Persediaan Jasa Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperbihnya Pervediaan Jasa (Dengan Satuan: %)	100	1.433.441.400		1.040.671.556	100	72.600	Sekretaris
33	Persediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang disediakan (Dengan Satuan: Surat)	2.500	50.746.800		37.311.311	100	73.524	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
34	Persediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani (Dengan Satuan: Orang)	156	700.902.000		559.343.675	100	79.803	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
35	Persediaan Jasa Perlalatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbanki (Dengan Satuan: Unit/Set)	100	202.660.000		29.697.350	100	14.654	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
36	Persediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani (Dengan Satuan: Orang)	156	479.132.600		414.319.220	100	86.473	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
37	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terperbihnya Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan: %)	100	1.074.433.400		805.541.090	100	74.974	Sekretaris
38	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	7	61.220.000		57.066.211	100	93.215	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
39	Persediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara (Dengan Satuan: Unit)	2	312.660.000		178.534.834	100	57.102	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

40	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	1	524.102.400	1	512.385.300	100	97.764	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
41	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara (Dengan Satuan:Unit/Set)	6	176.451.000	6	57.554.745	100	32.618	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									
PREDIKAT KINERJA									
42	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyampaian RAPERDA APBD/P. Tepat Waktu (Dengan Satuan:%)	100	21.556.365.080	100	3.574.176.085	100	16.279	Bidang Anggaran
		Persentase Laporan Perbendaharaan yang Akutabel (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Bidang Perbendaharaan
		Rasio realisasi belanja terhadap anggaran belanja keuangan daerah (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Bidang Anggaran
		Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Bidang Akuntansi dan Pelaporan
		Persentase jumlah aset yang dikelola pemerintah daerah (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Bidang Anggaran
		Persentase terpenuhinya kebutuhan administrasi persantoran (Dengan Satuan:%)	100		100		100		Bidang Anggaran
43	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	2.345.759.350	100	1.765.140.818	100	75.561	Kepala Bidang Anggaran
44	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah dokumen KUA dan PPAS yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	210.981.500	1	199.722.500	100	94.664	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
45	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah dokumen perubahan KUA dan PPAS yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	1	237.164.500	1	213.255.500	100	98.352	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
46	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang disusun dan diverifikasi (Dengan Satuan:RKA SKPD)	33	166.099.800	33	124.270.500	100	74.817	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
47	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah RKA Perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi (Dengan Satuan:RKAP SKPD)	33	192.245.800	33	157.547.500	100	81.951	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
48	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang disusun dan diverifikasi (Dengan Satuan:DPA SKPD)	33	95.409.800	33	84.969.000	100	89.057	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran

49	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah DPA Perubahan SKPD yang disusun dan diverifikasi (Dengan Satuan: DPA/ SKPD)	33	108.779.800	33	85.593.500	100	78.685	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
50	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang disusun (Dengan Satuan: Peraturan)	2	391.170.000	2	176.125.350	100	45.025	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
51	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang perubahan APBD dan Perwako tentang Penjabaran APBD yang disusun (Dengan Satuan: Peraturan)	2	330.720.000	2	218.396.000	100	66.037	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
52	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penjabaran APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Perda tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan Perda tentang Penerimaan Modal yang disusun (Dengan Satuan: Peraturan)	1	613.188.150	1	485.550.968	100	79.185	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
53	Koordinasi dan Pengelolaan Perencanaan Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: %)	100	549.304.950	100	470.659.046	100	85.683	Kepala Bidang Perencanaan
54	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Buku KAS Daerah (Dengan Satuan: Buku)	15	106.819.400	15	64.797.000	100	60.660	Sub Koordinator Penatausahaan Kas Daerah
55	Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Pencatatan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen SPD (Dengan Satuan: Dokumen)	8	128.560.150	8	127.119.000	100	98.879	Sub Koordinator Pengendalian Belanja
56	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Register SP2D dan SP2D yang di terbitkan (Dengan Satuan: Dokumen)	12	313.925.400	12	278.743.046	100	88.793	Sub Koordinator Penerimaan dan Pengeluaran
57	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: %)	100	927.506.700	100	720.206.360	100	77.650	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan
58	Koordinasi Penyusunan Laporan, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan, dan Semesteran (Dengan Satuan: Laporan)	3	114.897.400	3	89.231.100	100	77.662	Sub Koordinator Akuntansi Penerimaan
59	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Konsolidasi (Dengan Satuan: Laporan)	1	4.688.500	1	0	100	0	Sub Koordinator Akuntansi Penerimaan
60	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Rencana Anggaran Pendapatan, APBD Kabupaten dan Rencana Anggaran Pendapatan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dan Penerimaan Akuntansi Penerimaan Daerah	Jumlah Perda dan Perwako Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (Dengan Satuan: Dokumen)	2	413.442.400	2	367.146.750	100	88.845	Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah
61	Penyusunan Kebijakan dan Produk, Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Penerimaan Daerah	Jumlah Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (Dengan Satuan: Dokumen)	1	109.978.400	1	40.685.700	100	36.994	Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah
62	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Penerimaan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban (Dengan Satuan: Orang)	68	284.700.000	68	223.142.810	100	78.378	Sub Koordinator Pelaporan Keuangan Daerah
63	Pemungutan Unsur Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Terpenuhiya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan: %)	100	17.308.775.530	100	81.000.000	100	0.468	Kepala Bidang Anggaran

64	Pengelolaan Data Darurat dan Mendesak	Jumlah Data Darurat dan Mendesak (Dengan Satuan:Laporan)	1	17.308.475.530	1	81.000.000	100	0,468	Sub Koordinator Penyusunan Anggaran
65	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	100	825.318.550	100	536.879.861	100	65,051	Kepala Bidang Anggaran
66	Implementasi dan Peneliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah pengembangan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah (Dengan Satuan:Sistem)	1	680.888.750		481.529.861	100	70,721	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
67	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Pembinaan Sistem Informasi pemerintah daerah Bidang Keuangan Daerah (Dengan Satuan:Sistem)	1	144.429.800		55.350.000	100	38,323	Sub Koordinator Pengelolaan Teknologi Informasi Keuangan Daerah
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									
PREDIKAT KINERJA									
68	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Manajemen Aset/BMD (Dengan Satuan:%)	100	1.890.287.400		1.424.435.826	ST	SR	Bidang Aset
69	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terpenuhi Kebutuhan Administrasi Barang Milik Daerah (Dengan Satuan:%)	100	1.890.287.400		1.424.435.826	100	75,356	Kepala Bidang Aset
70	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Aset/BMD (Dengan Satuan:Laporan)	214	80.080.000		73.260.000	100	91,484	Sub Koordinator Penatausahaan Aset
71	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Scriptkat yang diberikan (Dengan Satuan:Persil)	20	806.015.000		551.340.582	100	68,403	Sub Koordinator Pengamanan dan Pemandhutan Aset
72	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penilaian Aset/BMD daerah (Dengan Satuan:Laporan)	15	136.050.000		6.000.000	100	4,410	Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset
73	Optimalisasi Penggunaan, Pemeliharaan, Peminadahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan dan Penghapusan BMD (Dengan Satuan:Laporan)	50	293.965.400		260.658.311	100	88,670	Sub Koordinator Penilaian dan Penghapusan Aset
74	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Buku Nencia Ase/BMD (Dengan Satuan:Buku)	6	375.627.000		355.667.000	100	94,686	Sub Koordinator Penatausahaan Aset
75	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Pengelolaan BMD (Dengan Satuan:Orang)	214	198.550.000		177.509.933	100	89,403	Sub Koordinator Penatausahaan Aset
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (%)									
PREDIKAT KINERJA									
76	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah (Dengan Satuan:%)	4	5.874.685.000		4.985.172.381	ST	T	Bidang Pendafatran dan Penetapan Pajak Daerah

		Penyampaian, pertumbuhan, pendapatan pajak daerah (Dengan Satuan:%)	4	0	0	0	Bidang Penghasilan dan Pengendalian Pajak Daerah
77	Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Terperluhnya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	4	4	4.985.172.381	84.859	Kepala Bidang Pendapatan dan Pencapaian Pajak Daerah
		Terperluhnya Kebutuhan Administrasi Keuangan (Dengan Satuan:%)	4	4		100	Kepala Bidang Penghasilan dan Pengendalian Pajak Daerah
78	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Perda, Perwako, dan SK Walikota serta SK Kepala Badan yang disusun (Dengan Satuan:Peraturan)	3	3	457.759.800	89.717	Sub Koordinator Pendapatan dan Pelayanan Pajak Daerah
79	Pertemuan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi Penyuluhan Kebijakan Pajak Daerah (Dengan Satuan:Peserta)	200	200	414.876.311	91.770	Sub Koordinator Pendapatan dan Pelayanan Pajak Daerah
80	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pengelolaan Pajak Daerah yang tersedia (Dengan Satuan:Sistem)	1	1	272.280.000	95.596	Sub Koordinator Pendapatan dan Pelayanan Pajak Daerah
81	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah data wajib Pajak baru dan data yang terupdate (Dengan Satuan:Wajib Pajak)	75.000	75.000	463.399.200	85.493	Sub Koordinator Pendapatan dan Penetapan Pajak Daerah
82	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Sistem Pajak dan Fasilitas Payment Online daerah yang terpeliharai (Dengan Satuan:Sistem)	5	5	787.676.800	96.714	Sub Koordinator Verifikasi dan Informasi Pajak Daerah
83	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah NIOIP PBB dan BPHTB yang terupdate (Dengan Satuan:Wajib Pajak)	66.000	66.000	215.240.200	92.887	Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah
84	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Penetapan dan Besarnya Ketetapan Pajak Daerah (Dengan Satuan:SKPD dan SSPD yang Tercetak)	13.000	13.000	176.552.400	81.861	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
85	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi Pajak Daerah yang diberikan kepada masyarakat (Dengan Satuan:Pelayanan Pajak)	500	500	12.800.000	100	Sub Koordinator Pendaftaran dan Pelayanan Pajak Daerah
86	Penghasilan Pajak Daerah	Jumlah Ketetapan dan Piutang Pajak Daerah yang tertagih (Dengan Satuan:Wajib Pajak)	30.000	30.000	696.678.000	90.634	Sub Koordinator Penghasilan dan Piutang Pajak Daerah
87	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Keberatan yang berhasil diselesaikan (Dengan Satuan:Laporan Hasil Penyelesaian)	35	35	1.750.000	1.656	Sub Koordinator Pemeriksaan dan Keberatan Pajak Daerah
88	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Jenis Pajak di verifikasi dan diawasi (Dengan Satuan:Pajak Daerah)	10	10	1.657.171.215	82.668	Sub Koordinator Operasional dan Penindakan Pajak Daerah

[illegible]

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Badan Keuangan Daerah Tipe A merupakan unsur penunjang perangkat daerah bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan Keuangan Daerah, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi merupakan hal yang penting dalam melaksanakan program dan kegiatan pada suatu instansi pemerintah. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, berdasarkan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 51), menjelaskan bahwa Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang keuangan, pendapatan dan aset daerah;
- b. penetapan rencana strategis Badan Keuangan Daerah untuk mendukung visi dan misi dan kebijakan Walikota;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota Pangkalpinang bidang keuangan daerah;
- d. penetapan rencana kerja Badan Keuangan Daerah menurut skala prioritas dan mendistribusikannya kepada bawahan;
- e. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang keuangan daerah;
- f. pelaksanaan perencanaan bidang keuangan daerah;
- g. pengkoordinasian dan pelaksanaan keuangan lingkup kota termasuk dukungan dana, sarana dan prasarana Badan Keuangan Daerah; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bakeuda, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, yang dipetakan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3

Pemetaan Permasalahan Pokok, Permasalahan dan Akar Masalah

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Belum optimalnya Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pendapatan Asli Daerah	belum optimalnya pengelolaan keuangan dan aset daerah	Masih ada keterlambatan penyampaian laporan keuangan Perangkat Daerah
		Adanya perubahan Petugas di Perangkat Daerah
	belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang	belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak daerah bagi public
		belum optimalnya kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) , yang sudah diperoleh sejak tahun 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang maka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab Bakeuda, namun perlu adanya sinergi dari seluruh Perangkat Daerah. Sampai saat ini terdapat permasalahan yaitu masih ada keterlambatan

dari beberapa Perangkat Daerah untuk menyampaikan laporan keuangan dan aset sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Bakeuda sehingga mengurangi kesempurnaan tersebut, walaupun LKPD disampaikan tepat waktu pada akhirnya. Keterlambatan tersebut dikarenakan pergantian petugas di tiap Perangkat Daerah dan tentunya ini bukan wewenang dari Bakeuda.

Dan belum optimalnya Peningkatan Pendapatan Pajak Daerah (PPD) untuk menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pangkalpinang dikarenakan masih adanya akar masalah berkenaan, belum optimalnya penggunaan teknologi informasi terkait pelayanan pajak publik, adanya beberapa keluhan yang disampaikan terkait pelayanan pajak bumi dan bangunan (PBB), pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan beberapa pajak daerah lainnya, termasuk sarana dan prasarana pelayanan yang masih belum optimal. Terkait belum optimalnya kajian dan analisis terkait penetapan potensi pajak daerah juga menjadi salah satu kendala untuk meningkatkan Pendapatan Pajak Daerah.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan harus dapat menunjukan suatu kondisi yang diinginkan di masa mendatang, sedangkan tujuan RPD 2024 - 2026 Kota Pangkalpinang adalah ***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Yang Baik Menuju Tercapainya Good Governance ”*** hal ini ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dapat dilakukan dalam mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut tujuan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut : ***“Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah”***

3.2. Sasaran Perangkat Daerah

Sasaran yang ingin dicapai dalam RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024 - 2026 sebagai berikut ***“ Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah ”*** sedangkan Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang untuk sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah.

Tabel III.3
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Kinerja pada Tahun Ke		
				2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	<i>Meningkatkan Pengelolaan Keuangan, Aset dan Pendapatan Daerah</i>		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP
		1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah	100 %	100 %	100 %
		2. Meningkatkan Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	17 %	18 %	19 %

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Indikator Kinerja Utama Badan Keuangan Daerah Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Utama	Target 2025
1.	Meningkatnya Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Persentase penyajian laporan keuangan pemerintah sesuai standar akuntansi pemerintah	100 %
2.	Meningkatnya Pertumbuhan Pendapatan Pajak Daerah	Presentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18 %

Penetapan indikator-indikator kegiatan utama tersebut menjadi dasar bagi penetapan dan indikator-indikator kegiatan-kegiatan penunjang. Pemerintah dan unsur penunjang keuangan logika pengembangan indikator-indikator penunjang ini diletakkan suatu peta strategis yang menggambarkan kaitan sebab akibat yang menyeimbangkan pengembangan aspek manajemen internal seperti kapasitas kelembagaan dan proses internal.

Pada dasarnya, seluruh kaitan sebab akibat antar indikator kinerja ini sama dengan hubungan sebab akibat yang sudah diasumsikan terjadi pada tujuan dan program sebagaimana digambarkan pada bagian terdahulu. Jadi seluruh indikator kinerja kegiatan pada perspektif pertumbuhan dan pembelajaran akan dianggap faktor yang berperan dalam mencapai kinerja pada enam persepektif diatas. Indikator kegiatan persepektif peningkatan proses internal pun diasumsikan akan menyumbang bagi pencapaian hasil kegiatan-kegiatan pada persepektif di atas.

Peta strategi dan indikator kinerja kunci tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh satuan kerja dalam mengembangkan berbagai kegiatan yang dianggap perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan keunikan permasalahan dimasing-masing tempat

4.2. Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2025 secara keseluruhan adalah 4 program, 15 kegiatan, dan 66 Sub Kegiatan yang terdiri dari :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari 8 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan
- b. Program Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari 5 Kegiatan dan 20 Sub Kegiatan
- c. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 6 Sub Kegiatan
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 Kegiatan dan 12 Sub Kegiatan

Dana indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif tercantum pada tabel dibawah ini :

								1	Dokumen	205.442.500,00	Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		205.442.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.000		Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD														
			Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD					1	Dokumen	171.272.500,00	Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		102.812.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.01.000		Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD														
			Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran					3	Dokumen	361.800.000,00	Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		111.081.084,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah yang Tepat Waktu					100 %		245.336.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		245.336.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.001		Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah					12	Dokumen	71.180.000,00	Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		71.180.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.003		Penyusunan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD					8	Dokumen	87.192.000,00	Kota Pangkal Pinang, Seluruh Kecamatan, Seluruh Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		87.192.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.02.2.02.000		Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait														

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Keuangan Daerah	Persentase Terlaksananya Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	-	100 %	5.000.000.000,00	-	-	Pembangunan Pemertan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.04.009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak										
		Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1 Laporan	5.000.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Pemertan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	5.000.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.05	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase Data dan SIPD Lingkup Keuangan Daerah yang Dapat Diakses	-	100 %	35.000.000,00			Pembangunan Pemertan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	124.060.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.05.002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah										
		Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah		1 Dokumen	20.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Pemertan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	75.610.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.02.2.05.003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota										
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1 Orang	15.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Pembangunan Pemertan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	48.450.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
2,	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase Ketersediaan Manajemen aset/ BMD	100 %	100 %	750.268.209,00					741.598.209,00	

5.02.03.2.01.006	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Tepat Waktu	-			100 %	750.268.209,00		-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	741.598.209,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
Inventarisasi Barang Milik Daerah													
5.02.03.2.01.006		Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah				34 Laporan	164.062.000,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	164.062.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
Pengamanan Barang Milik Daerah													
5.02.03.2.01.007		Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah				250 Laporan	218.487.009,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	209.817.009,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
Penilaian Barang Milik Daerah													
5.02.03.2.01.008		Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah				1 Laporan	79.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	79.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah													
5.02.03.2.01.010		Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah				20 Dokumen	112.659.200,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	112.659.200,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah													
5.02.03.2.01.011		Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah				34 Laporan	84.660.000,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	84.660.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	5.02.04.2.01.0 005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						1	Laporan	408.750.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	408.750.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0 006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						1	Laporan	215.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	215.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0 007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)						69000	Obyek Pajak	227.349.165,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	227.349.165,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0 008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						74500	Dokume n	51.290.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	51.290.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0 009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						10	Layanan	29.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	29.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	5.02.04.2.01.0 011	Penagihan Pajak Daerah						52963	Dokume n	332.956.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	391.901.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

5.02.04.2.01.0 012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah										BADAN KEUANGAN DAERAH		
		Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah				40 Dokume n	28.000.000,00	Kota Pangkal pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	53.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0 013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah										BADAN KEUANGAN DAERAH		
		Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah				10 Dokume n	247.580.000,00	Kota Pangkal pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	288.580.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
5.02.04.2.01.0 014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah										BADAN KEUANGAN DAERAH		
		Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah				3 Laporan	45.000.000,00	Kota pangkal pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	70.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
4,	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat DaerahIndeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah	83 Nilai95 Nilai			78 Nilai75 Nilai	39.709.459.797,00			83 Nilai95 Nilai		39.709.459.797,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 %	1.529.103.000,00			-	Pembangu nan Pemerit ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	1.529.103.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
-	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor										BADAN KEUANGAN DAERAH		
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	74.000.000,00	Kota Pangkal pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemerit ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	74.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
-	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor										BADAN KEUANGAN DAERAH		

		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	20.287.500,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	20.287.500,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penurunan Tingkat Pelanggaran Disiplin ASN	-			0,3 %	139.600.000,00		-		Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	139.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi													
		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 Orang	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian													
		Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				12 Dokume n	3.600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	3.600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	136.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	136.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Barang Milik Perangkat Daerah yang Ditata dan Dinventarisir	-			100 %	3.700.000,00		-		Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	3.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD													
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	3.700.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	3.700.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-	100 %	1.800.000,00	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	-	1.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah										
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokume n	600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Laporan Keuangan Perangkat sesuai SAP	-	100 %	35.430.595.797,00		-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	35.430.595.797,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran										
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokume n	14.515.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	14.515.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD		12 Laporan	2.905.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	2.905.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD										
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	2.905.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamata n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Pemer ntahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	2.905.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN										

		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	2.250.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	2.250.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN												
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				76Orang /bulan	35.408.020.797,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	35.408.020.797,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu			100 %	1.800.000,00			-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	1.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah												
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD												
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	600.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	600.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD												
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel./Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD												
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD												
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	1.529.103.000,00			-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		1.529.103.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			40 Laporan	350.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		350.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyampaian Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Kinerja Perangkat Daerah Tepat Waktu	-		100 %	1.800.000,00			-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		1.800.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD												
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			1 Dokumen	0,00	Kota Pangkal Pinang, Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-		100 %	1.529.103.000,00			-	Pembangunan Pemerintah nahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah		1.529.103.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH

	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Dokumen	263.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	263.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah	-			100 %	100.000.000,00		-		Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				2 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Unit	100.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	100.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 %	1.641.000.000,00		-		Pembangunan Pemerintahan Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	1.641.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														

		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	0,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	0,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12 Laporan	663.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	663.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		4 Laporan	86.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	86.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor										
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		2 Laporan	891.500.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	891.500.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	100 %	863.661.000,00		-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	863.661.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan										
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		1 Unit	37.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, n, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Pemerintah Akselerasi Reformasi Birokrasi dan Demokrasi Daerah	-	37.000.000,00	BADAN KEUANGAN DAERAH
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan										

BAB V

PENUTUP

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2024 – 2026 dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Kota Pangkalpinang serta target dan sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2025.

Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan yang bersumber dari Anggaran APBD Tahun 2025 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun lalu.

Dengan adanya Renja Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, maka penerapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran Tujuan dan Sasaran instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergi serta berkelanjutan dengan sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Pangkalpinang maupun dengan Perangkat Daerah yang membidangi fungsi lain.

Pangkalpinang, April 2024

KEPALA BADAN KEUANG DAERAH
KOTA PANGKALPINANG



MUHAMMAD YASIN, S.E., M.M

PEMBINA TK.1 / IV B

NIP. 197311222002121006